

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Evaluasi Kegiatan

1. Pengertian Evaluasi

Wirawan, dalam bukunya yang berjudul *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* mendefinisikan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Ralph Tyler (Brinkerhoff et al, 1983) dalam Wirawan "*the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*" Yaitu proses yang menentukan sampai sejauhmana tujuan pendidikan dapat dicapai.

Definisi lain mengenai evaluasi dikemukakan oleh Mustofadijaya, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Apabila dalam konteks kebijakan publik maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang terjadi dan sebagainya. (Widodo, 2007:111)

Selanjutnya Jones dalam Widodo (2007:113-114) mengartikan evaluasi sebagai suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya. Sedangkan Ernest House berpendapat bahwa evaluasi dilakukan untuk menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan agar mereka dapat menentukan alokasi sumber-sumber vital yang dibutuhkan masyarakat. (Wirawan, 2011:54)

Edward A. Suchman, Professor of Sociology University of Pittsburg menulis buku berjudul *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Program* (1987) yang menunjukkan pandangannya mengenai evaluasi sebagai suatu penelitian. Ia membedakan antara evaluasi sebagai suatu pemakaian pendapat umum yang menunjukkan suatu proses sosial membuat penilaian mengenai manfaat dan riset evaluatif (*evaluative research*) sebagai suatu adjektif menspesifikasi suatu jenis riset. (Wirawan, 2011:39) Dari berbagai teori diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi adalah menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari suatu kebijakan.

2. Pengertian Kegiatan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan.

Dalam UU RI NO 15 TH 2006 disebutkan bahwa kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan. (Abdul Halim dalam <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html>)

RAMLAN. S mendefinisikan kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. (<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html>)

Berdasarkan berbagai definisi kegiatan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan adalah suatu tindakan, pekerjaan dan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja atau lembaga.

3. Evaluasi Kegiatan

Tujuan evaluasi dari suatu kegiatan adalah untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi ini adalah lebih diarahkan kepada hasil, manfaat dan dampak dari program.

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan dari rencana pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan kegiatan.

Evaluasi kegiatan adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi selalu berupaya untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana. Disamping itu evaluasi juga mengukur hasil-hasil pelaksanaan secara objektif dengan ukuran yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. (Jaya martha dalam http://www.idb-unj.info/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=52)

4. Jenis Evaluasi

Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu :

1. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
2. *Single program befora-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.

3. *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
4. *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Menurut James Anderson, evaluasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga. *Tipe pertama*, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. *Kedua*, evaluasi kebijakan yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. *Ketiga*, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai. Berdasarkan jenis dan tipe yang telah dijelaskan di atas, maka menurut Edward A. Suchman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu: (1) mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi; (2) analisis terhadap masalah; (3) deskripsi dan standardisasi kegiatan; (4) pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; (5) menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; (6) beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. (Riant Nugroho, 2010: 675)

a. Evaluasi Berbasis Tujuan

Evaluasi Berbasis Tujuan dalam bahasa Inggris disebut *Goal Based Evaluation Model* yang dikembangkan oleh Ralph W. Tyler. Ia mendefinisikan evaluasi sebagai “ ... *the process of determining to what extent the educational objectives*

are actually being realized” (Brikerhoff et.al, 1983). Evaluasi merupakan proses menentukan sampai seberapa tinggi tujuan pendidikan sesungguhnya dapat dicapai. Jenis evaluasi berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan atau intervensi, layanan dari program yang tercantum dalam rencana program. Objektif program kemudian dirumuskan dalam indikator-indikator kuantitas dan kualitas yang dapat diukur.
2. Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator. Evaluator merumuskan tujuan program menjadi indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur.
3. Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjangkau data. Evaluator menentukan apakah akan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Mengembangkan instrumen untuk menjangkau data.
4. Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan. Layanan, intervensi dari program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai pencapaian tujuan, pengaruh atau perubahan yang diharapkan.
5. Menjangkau dan menganalisis data/informasi pencapaian program, atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan membandingkan dengan objektif yang direncanakan dalam rencana program untuk menentukan apakah terjadi ketimpangan.
6. Mengambil keputusan mengenai program. Keputusan dapat berupa; a) jika program dapat mencapai tujuannya sepenuhnya, program dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain, b) Jika program berhasil dan masyarakat sudah

tidak memerlukan lagi maka program dihentikan, c) Jika program gagal, tetapi masih diperlukan oleh sebagian besar masyarakat, maka program dianalisis penyebab kegagalan dan kemudian dikembangkan dan dimodifikasi. (Wirawan, 2011:80-82)

b. Evaluasi Sistem Analisis

Evaluasi sistem analisis atau sering disebut Management Evaluation Model. Setiap program mempunyai tujuan program, yaitu apa yang akan dicapai dengan dirancang dan dilaksanakan. Dalam program sosial tujuan program adalah menciptakan perubahan sosial dengan melakukan intervensi sosial. Indikator dari evaluasi ini menjadi parameter dan dasar penilaian pelaksanaan kegiatan. Pengkajian ulang akan dilakukan terhadap kegiatan yang tidak memenuhi indikator-indikator tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi sistem analisis untuk menganalisis indikator suatu pelaksanaan kegiatan SPP, yaitu:

1. Evaluasi masukan (*input evaluation*). Yaitu mengevaluasi masukan rencana program terdahulu untuk dijadikan program yang akan dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk melaksanakan program.
2. Evaluasi proses (*process evaluation*). Evaluasi proses memfokuskan pada pelaksanaan program dan menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki.

3. Evaluasi keluaran (*output evaluation*). Evaluasi keluaran mengukur dan menilai keluaran daripada program, yaitu produk yang dihasilkan program. Berapa banyak dan berapa baik produk dari program.
4. Evaluasi akibat (*outcome evaluation*). Evaluasi akibat mengukur apakah masyarakat yang mendapatkan layanan program berubah menjadi lebih baik. (Wirawan, 2011:107-110)

5. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain adalah:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial untuk menyelesaikan masalah, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat. Program juga diadakan untuk mengubah keadaan masyarakat yang dilayani.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya suatu program dapat tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Mengambil keputusan mengenai program. Salah satu tujuan evaluasi program adalah untuk mengambil keputusan mengenai program. Jika

evaluasi suatu program menunjukkan berhasil malakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata program buruk dan kurang bermanfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan.

6. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka kebebasan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 2005:58)

Dalam Suharto (2005:58), beberapa ahli mendefinisikan pengertian pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah sebagai tujuan, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. (Parson, 1994)

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Pada kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan. (Sedarmayanti, 2012 : 142).

Pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang saling berkaitan :

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat desa.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing.
3. Membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup karena lokasi perkampungan terpencil, seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong-royong harus diutamakan.
4. Mengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintahan desa harus mampu

menampung aspirasi dan menggali aspirasi masyarakat. (Kartasasmita dalam Wrihatnolo 2007 : 34).

Dengan demikian dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)

1. Pengertian PNPM MP

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) merupakan kelanjutan dari program serupa, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM : Generasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik.

Berdasarkan Buku Pedoman Umum PNPM MP Tahun 2008 yang menyatakan bahwa visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

“Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.”

Kesejahteraan berarti terpenuhinya dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar ekonomi masyarakat
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM MP, strategi yang dikembangkan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan

melalui harmonisasi dari pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberkelanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Prinsip-prinsip dasar PNPM MP

PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- 2) Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- 3) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- 5) Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- 6) Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- 7) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- 8) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- 9) Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- 10) Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

- 11) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- 12) Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

(Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2008. *Pedoman umum program nasional PNPM Mandiri*. Sekretariat Tim Pengendali PNPM mandiri)

3. Pengertian PNPM MP Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

4. Tujuan dan Ketentuan PNPM MP Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1) Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

2) Tujuan Khusus

- a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar
- b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
- c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
(Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2008. *Pedoman umum program nasional PNPM Mandiri*. Sekretariat Tim Pengendali PNPM mandiri.)

5. Ketentuan Dasar

Ketentuan dasar dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut:

- 1) *Kemudahan*, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- 2) *Terlembagakan*, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- 3) *Keberdayaan*, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) *Pengembangan*, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
- 5) *Akuntabilitas*, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Tim Pengendali PNPM

Mandiri. 2008. *Pedoman umum program nasional PNPB Mandiri*.
Sekretariat Tim Pengendali PNPB Mandiri)

c. Ketentuan Pendanaan BLM

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.

1) Sasaran dan Bentuk Kegiatan

- a. Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.
- b. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

2) Ketentuan Kelompok SPP, yaitu :

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu Tahun.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- d. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Kerangka Pikir

Salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat desa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sebagai prioritas mendesak, khususnya terhadap masyarakat pedesaan. Salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu program SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

SPP (Simpan Pinjam Perempuan) adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan dalam bentuk dana simpan pinjam, bagi mereka yang telah mempunyai usaha. Secara umum kegiatan SPP ini bertujuan untuk mengembangkan potensi usaha masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) khususnya perempuan, dan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha produktif, dimana dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan seluruh unsur yang terdapat di daerah, mulai dari unsur pemerintah, pihak konsultan maupun masyarakat yang menjadi sasaran program ini.

Evaluasi program SPP ini akan menjawab sejauhmana pelaksanaan program SPP telah tercapai. Keberhasilan program dapat dikaji dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari tinjauan proses (implementasi) dan hasil (*outcome*). Penelitian

ini dilihat dari segi proses (implementasi) yang menekankan konsistensi antara pelaksanaan program dengan *policy guidelines* yang ditentukan. Menurut perspektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaan program sesuai dengan *policy guidelines* yang ditentukan. *Policy guidelines* adalah petunjuk ketentuan pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain: cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan pemanfaat program (Dwiyanto, 1995).

Dengan menggunakan model evaluasi sistem analisis atau sering disebut Management Evaluation Model. Setiap program mempunyai tujuan program, yaitu apa yang akan dicapai dengan dirancang dan dilaksanakan. Dalam program sosial tujuan program adalah menciptakan perubahan sosial dengan melakukan intervensi sosial. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi sistem analisis yaitu:

1. Evaluasi masukan (*input evaluation*). Yaitu mengevaluasi masukan rencana program terdahulu untuk dijadikan program yang akan dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk melaksanakan program. Pada evaluasi masukan program SPP peneliti memfokuskan pada prosedur pelaksanaan Kegiatan SPP sebagai berikut:
 - a. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan SPP
 - b. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat
2. Evaluasi proses (*process evaluation*). Evaluasi proses memfokuskan pada pelaksanaan program dan menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki. Evaluasi proses dalam penelitian ini memfokuskan pada

pelaksanaan PNPM MP SPP berdasarkan ketentuan dasar dalam kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP), yaitu;

- a. Kemudahan
 - b. Pengembangan
 - c. Akuntabilitas
- a. Evaluasi keluaran (*output evaluation*). Evaluasi keluaran mengukur dan menilai keluaran daripada program, yaitu melihat tingkat keberhasilan program, apakah program sesuai dengan tujuan dari PNPM MP SPP, antara lain;
- a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 - b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga miskin.
 - c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
4. Evaluasi akibat (*outcome evaluation*). Evaluasi akibat mengukur apakah masyarakat yang mendapatkan layanan program berubah menjadi lebih baik. Pada evaluasi akibat peneliti menganalisis tentang pemberdayaan yaitu;
- a. Pemberdayaan Sosial
 - b. Pemberdayaan Ekonomi
 - c. Keberlanjutan Program

(Wirawan, 2011:107-110)

Untuk mengetahui kerangka pikir dari penelitian ini dijelaskan pada bagan berikut ini:

Bagan 1.

Bagan Kerangka Pikir

